

**UJIAN NASIONAL DAN PEMBUDAYAAN SISWA AKTIF BELAJAR
(Refleksi Pasca Putusan Permendikbud No. 5 Tahun 2015
tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik UN)**

BAHARUDIN
Email: cik_baal@yahoo.co.id

JURUSAN PGMI FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
IAIN RADEN INTAN LAMPUNG

Abstrak

Pendidikan merupakan wahana pembentukan karakter bangsa (character building). Ini artinya, pembangunan bangsa bukan hanya memperhatikan acuan substantif konseptual saja, tetapi lebih pada attitude yang tercermin dalam perilaku warga negaranya dalam sehari-hari. Dikeluarkannya Permendikbud No. 5 Tahun 2015, revisi dari Permendikbud No.144 Tahun 2014 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah/Program Kesetaraan dan Ujian Nasional merupakan respon progresif pemerintah dalam menjawab polemik permasalahan seputar UN. Terlepas dari perkara UN sebagai ketetapan kelulusan siswa atau bukan, sudah suatu kewajiban bagi siswa untuk semangat dalam belajar. Sekolah tidak semestinya diorientasikan hanya untuk mendapatkan ijazah dan sekedar lulus, namun terpenting bisa mendapatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang sebanyak-banyaknya yang sangat berguna bagi masa depannya nanti. Pembudayaan siswa aktif belajar dengan menempatkan siswa sebagai subjek/pelaku belajar harus menjadi habit dan kebutuhan bagi siswa. Premis ini memberikan pesan bahwa setiap guru harus merancang skenario pembelajaran yang memungkinkan siswa dapat beraktivitas belajar sebanyak mungkin dan memperoleh pengalaman belajar yang bermakna.

Kata kunci: *Pembudayaan, Permendikbud No. 5 Tahun 2015, siswa aktif belajar, UN*

A. PENDAHULUAN

Mutu pendidikan di Indonesia pada saat ini masih terpuruk. Di dunia internasional, kualitas pendidikan Indonesia berada di peringkat ke-64 dari 120 negara di seluruh dunia berdasarkan laporan tahunan UNESCO *Education For All Global Monitoring Report* 2012. Sedangkan berdasarkan laporan terbaru Program Pembangunan PBB tahun 2013, Indonesia menempati posisi 121 dari 185 negara dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan angka 0,629. (www.prestasi-iiief.org). Dengan angka itu Indonesia tertinggal dari dua negara tetangga ASEAN yaitu Malaysia (peringkat 64) dan Singapura (18), sedangkan IPM di kawasan Asia Pasifik adalah 0,683.

Ujian nasional dan pembudayaan siswa aktif belajar (Refleksi pasca putusan permendikbud no. 5 tahun 2015 tentang kriteria kelulusan peserta didik UN)

Berdasarkan data *The Learning Curve Pearson 2014*, sebuah lembaga pemeringkatan pendidikan dunia, memaparkan jika Indonesia menduduki posisi akhir dalam mutu pendidikan di seluruh dunia. Indonesia menempati posisi ke-40 dengan indeks rangking dan nilai secara keseluruhan yakni minus 1,84. Sementara untuk nilai pencapaian pendidikan yang dimiliki Indonesia, diberi skor -2,11. Posisi Indonesia ini menjadikan yang terburuk, di mana Meksiko, Brasil, Argentina, Kolombia, dan Thailand, menjadi lima negara dengan rangking terbawah yang berada di atas Indonesia. (<http://news.okezone.com/rangking>)

Berbagai usaha telah dilakukan pemerintah Indonesia, diantaranya dengan melaksanakan Ujian Nasional (UN). Hal ini agar Indonesia memiliki standar pendidikan nasional dan dapat berkompetesi dengan bangsa lain. Pelaksanaan UN telah berlangsung pada pertengahan April hingga Mei 2015 yang telah lalu. Untuk jenjang SMA/Sederajat, UN dilaksanakan pada tanggal 13-15 April 2015 sementara untuk SMP/Sederajat, UN dilaksanakan pada tanggal 4-6 Mei 2015. Berbeda dengan pelaksanaan tahun sebelumnya, UN pada tahun 2015 ini bukan penentu kelulusan atau kelulusan ditentukan sepenuhnya oleh pihak sekolah dengan mempertimbangkan hasil semua mata pelajaran dan aspek perilaku siswa. Kebijakan tersebut merujuk pada amanah UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, pasal 58 (1) berbunyi, “evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan”.

Dalam hal ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) hanya menetapkan nilai standar kelulusan UN untuk tiap mata pelajaran yang diujikan lebih dari 5,5. Siswa yang hanya mendapatkan nilai 5,5 atau kurang untuk suatu mata pelajaran dapat mengulang ujian pada tahun berikutnya untuk mata pelajaran itu saja. Bahkan, direncanakan mulai 2016, UN diselenggarakan pada awal semester terakhir sehingga siswa yang mendapat nilai di bawah standar atau tidak lulus untuk mata pelajaran tertentu bisa mengulang di semester yang sama tanpa harus menunggu tahun berikutnya. Dengan kebijakan ini, siswa diharapkan mampu memperbaiki mata pelajaran tersebut dan mendapat hasil maksimal sesuai standar nasional.

Respon masyarakat dalam menanggapi kebijakan UN bukan lagi penentu utama kelulusan siswa sangat beragam, namun secara umum mereka menyambut gembira. Selama ini, UN seolah menjadi problema besar yang harus dihadapi siswa. Hal ini pula yang menyebabkan sebagian besar siswa menganggap UN sebagai sesuatu yang menegangkan atau menakutkan sehingga siswa kerap tertekan. Praktek kecurangan, manipulasi, rekayasa, dan ketidakjujuran merebak di mana-mana, sebab sekolah dan guru berusaha melakukan segala cara, meskipun dengan cara-cara inkonstitusional.

Selain itu, Hilmy (Nashir, 2007: 58-59) merincikan beberapa hal yang menyebabkan UN ditolak yaitu: *Pertama*, sebagai penentu kelulusan siswa, padahal yang diujikan bukan seluruh mata pelajaran; *Kedua*, kualitas belajar tidak bisa dianggakan, kualitas belajar hanya bisa dinarasikan secara kualitatif; *Ketiga*, Ujian Nasional tidak merefleksikan Taksonomi Bloom, yang dimana didalamnya ada dua aspek penting dalam pendidikan yang tertinggal yaitu afektif dan psikomotorik; *Keempat*, Ujian Nasional tidak berorientasi *life skill*, siswa yang lulus Ujian Nasional dengan nilai tertinggi tidak dijamin mampu memecahkan berbagai persoalan dalam kehidupannya; *Kelima*, Ujian Nasional tidak mencerminkan pendidikan berbasis realitas, Ujian Nasional tidak langsung berkorelasi terhadap penyelesaian berbagai macam persoalan kehidupan; *Keenam*, Ujian Nasional tidak mampu membaca atau mempresentasikan potensi-potensi daerah lokal; *Ketujuh*, Ujian Nasional dapat mengundang kejahatan, seperti adanya bisnis jawaban soal Ujian Nasional yang akhirnya dapat menimbulkan kebocoran jawaban soal pada Ujian Nasional; dan *Kedelapan*, menciptakan ideologi persaingan yang tidak sehat

Berlawanan dengan itu, di samping yang kontra, terdapat pula yang pro agar UN tetap dijadikan penentu utama kelulusan siswa. Alasannya UN berfungsi sangat penting sebagai pengendali mutu pendidikan secara nasional. UN perlu dilaksanakan dalam rangka menegakkan akuntabilitas pengelola dan penyelenggara pendidikan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan dan masyarakat pada umumnya. Secara konseptual UN mampu menyediakan informasi yang akurat kepada masyarakat tentang prestasi yang dicapai oleh setiap peserta didik, sekolah, lembaga pendidikan kabupaten/kota, provinsi, dan prestasi

nasional secara keseluruhan. Informasi ini dapat digunakan untuk membandingkan prestasi belajar antar sekolah, kabupaten/kota, dan antar provinsi. Dalam konteks ini UN merupakan instrumen yang potensial untuk menyediakan informasi penting dalam menegakkan akuntabilitas. Selain itu, para pendukung UN mensinyalir ini adalah usaha pelemahan terhadap mutu pendidikan di Indonesia, sebab dengan ditiadakannya UN menjadikan semangat atau motivasi penyelenggara pendidikan (sekolah) dan siswa menjadi berkurang untuk meningkatkan mutu proses belajar mengajar mereka.

Terlepas dari pro kontra di atas, dalam tulisan ini penulis tidak ingin menjustifikasi mana yang lebih baik, karena dengan ditetapkannya UN sebagai penentu utama kelulusan siswa memiliki plus-minusnya masing-masing. Dalam tulisan ini, penulis hanya ingin mencari benang merahnya saja. Apa substansi awal dari diselenggarakannya UN tersebut, yaitu keinginan besar pemerintah untuk memajukan pendidikan di negeri ini. Dalam konteks ini, penulis ingin mengembalikan ke-khiitah awal atau cita-cita mulia dari pelaksanaan UN ini adalah untuk mengetahui kondisi satu daerah tertentu mengenai kualitas pendidikan masyarakat didiknya yang kemudian disebut sebagai pemetaan dengan tujuan untuk memberikan pembinaan dan pelatihan kepada sekolah-sekolah tertentu yang dianggap tidak dan kurang sesuai dengan standar pendidikan nasional (SNP) yang terdiri atas 8 standar, yakni standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga pendidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian sebagai acuannya.

Oleh karena itu perlu pembudayaan siswa aktif belajar. Maksudnya tanpa UN ditetapkan sebagai ketentuan utama kelulusan siswa maupun ditetapkan sebagai ketentuan utama kelulusan siswa, maka siswa sebagaimana arti namanya orang yang belajar, maka harus memosisikan dirinya sebagai orang yang giat, rajin, dan tekun dalam belajar. Tidak ada alasan belajar hanya untuk lulus, atau demi mendapatkan ijazah. Belajar harus menjadi *habit*, kebutuhan, dan kegemaran/kesenangan, serta pendorong siswa untuk menjadi orang yang sukses di masa depan dan dapat berguna bagi pembangunan bangsa dan negara.

B. PEMBAHASAN

1. Pengertian Ujian Nasional dan Permendikbud No. 5 Tahun 2015 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik Ujian Nasional

Ujian Nasional atau yang lebih dikenal dengan UN adalah kegiatan penilaian kompetensi peserta didik secara nasional pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Istilah UN digunakan bagi jenjang SLTP dan SMA sederajat, sedangkan bagi peserta didik dalam jenjang SD sederajat digunakan istilah Ujian Sekolah (US). Untuk mata pelajaran yang diujikan untuk dalam UN SMP/SMA adalah mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris. Sedangkan untuk US SD hanya Matematika, IPA, dan Bahasa Indonesia.

Menurut Syawal Gultom, Ujian Nasional adalah sistem evaluasi standar pendidikan dasar dan menengah di Indonesia. Selain itu sebagai sarana untuk memetakan mutu berbagai tingkatan pendidikan satu daerah dengan daerah lain. Menurut Setiadi, Ujian Nasional adalah penilaian hasil belajar oleh pemerintah yang bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi. Tilaar (2006: 109-110) Ujian Nasional adalah upaya pemerintah untuk mengevaluasi tingkat pendidikan secara nasional dengan menetapkan standarisasi nasional pendidikan Berdasarkan pendapat tersebut tentang Ujian Nasional maka dapat disimpulkan bahwa Ujian Nasional adalah sistem evaluasi atau penilaian standar pendidikan dasar dan menengah secara nasional dengan menetapkan standarisasi nasional pendidikan yang bertujuan sebagai data dalam rangka menyusun kebijakan pendidikan nasional

Menurut Ki Supriyoko, Ujian Nasional untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah perlu dilaksanakan dengan berbagai pertimbangan. *Pertama*, sebagai tolak ukur kualitas pendidikan antar daerah; *Kedua*, sebagai upaya standarisasi mutu pendidikan secara nasional; dan *Ketiga*, sebagai sarana memotivasi peserta didik, orang tua, guru, dan pihak-pihak terkait untuk meningkatkan prestasi belajar peserta didik dalam menghadapi standar pendidikan. Sementara, menurut Furqon dkk, alasan atau tujuan pentingnya diadakannya Ujian Nasional adalah sebagai berikut. *Pertama*, untuk mendorong guru meningkatkan kualitas mengajar. *Kedua*, untuk meningkatkan upaya-upaya bimbingan terhadap siswa

yang berkesulitan belajar; *Ketiga*, untuk mendorong guru menerapkan berbagai metode untuk memperbaiki pembelajaran; *Keempat*, supaya siswa lebih rajin dan giat belajar; dan *Kelima*, supaya orang tua lebih memperhatikan belajar anaknya. (Ki Supriyoko dalam Notodiputro dan Anwar, 2012)

Terkait fungsinya, hasil Ujian Nasional berfungsi sebagai pertimbangan untuk pemetaan mutu satuan dan/atau program pendidikan, seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya, penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan, akreditasi satuan pendidikan dan pembinaan serta pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. Berikut penjabaran fungsi dari Ujian Nasional :

- a. Alat pengendali mutu pendidikan secara nasional. Melalui penyelenggaraan Ujian Nasional diharapkan mutu pendidikan nasional dapat dikendalikan.
- b. Mendorong peningkatan mutu pendidikan. Penyelenggaraan Ujian Nasional diharapkan dapat memotivasi sekolah untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan berusaha untuk mencapai hasil Ujian Nasional secara optimal.
- c. Bahan pertimbangan untuk menentukan tamat belajar dan predikat prestasi peserta didik. Ujian Nasional menjadi kriteria yang akurat dan berlaku nasional untuk menentukan predikat dan prestasi peserta didik
- d. Pertimbangan dalam seleksi penerimaan siswa baru pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Butir-butir soal Ujian Nasional sudah disusun untuk mampu membedakan antara peserta didik yang telah memenuhi standar kompetensi dengan peserta didik yang belum menguasai standar kompetensi. Dengan demikian, akan sangat tepat bila digunakan juga untuk mengetahui potensi calon peserta didik untuk mengikuti pembelajaran disekolah yang dipilihnya

Sementara itu, hasil UN digunakan sebagai pertimbangan untuk :

- a. Pemetaan mutu program dan satuan pendidikan dasar. Pemetaan tersebut tidak hanya dapat digunakan oleh pemerintah pusat, melainkan juga untuk siswa, guru, sekolah dan pemerintah daerah, untuk melihat di mana posisi mereka secara nasional
- b. Seleksi masuk ke jenjang pendidikan berikutnya

- c. Pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upayanya untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Merujuk pada Permendikbud No. 5 Tahun 2015 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik Ujian Nasional tertanggal 12 Maret 2015 tertanda Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Anies Baswedan, tepatnya pada Pasal 2 peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan setelah:

- a. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran;
- b. Memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran
- c. Lulus Ujian US/M/PK; dan
- d. Lulus UN

Kelulusan peserta didik UN ditetapkan sepenuhnya oleh sekolah dengan mempertimbangkan capaian seluruh mata pelajaran, keterampilan, maupun sikap dan perilaku siswa selama duduk di bangku sekolah. Kelulusan peserta didik ditetapkan setelah satuan pendidikan menerima hasil UN peserta didik yang bersangkutan. Permendikbud No. 5 Tahun 2015 tersebut merupakan revisi dari Permendikbud Nomor 144 Tahun 2014 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah/Program Kesetaraan dan Ujian Nasional.

2. Pembudayaan Siswa Aktif Belajar

Kata pembudayaan (enkulturasi) dalam Kamus Bahasa Indonesia, disebut proses, cara, perbuatan membudayakan. Enkulturasi lebih menitikberatkan pada perubahan budaya yang terjadi di dalam budaya itu sendiri sehingga menjadi suatu adat atau pranata yang baku. Sebenarnya, istilah enkulturasi ini berkembang dan sangat populer dalam lapangan ilmu antropologi. Menurut Koentjaraningrat (1996: 145-147) proses enkulturasi adalah proses belajar dan menyesuaikan alam pikiran serta sikap terhadap adat istiadat, sistem norma, dan semua peraturan yang terdapat dalam kebudayaan seseorang. Kegiatan pembudayaan adalah upaya mentransformasi nilai-nilai moral dan pembentukan kepribadian dengan berbagai aspek mental, spiritual, dan psikologi. Pembudayaan adalah proses pencapaian hasil yang permanen berupa penghayatan segenap pengetahuan dan keterampilan yang didapat melalui pendidikan sehingga dengannya individu yang bersangkutan

mampu berbuat atau melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupannya dan/atau kehidupan orang lain. Dengan demikian pembudayaan mensyaratkan ‘penghayatan’ dan ‘perbuatan’ nyata yang timbul pada individu sebagai hasil pendidikan, baik yang berlangsung dalam keluarga, di masyarakat, ataupun dalam lembaga pendidikan formal seperti sekolah.

Dalam artikel ini, maka pembudayaan siswa aktif belajar adalah bagaimana belajar menjadi senyawa dan menjelma jadi suatu kebudayaan, tradisi, dan kebiasaan pada diri siswa, sehingga karenanya keaktifan belajar itu datang dari siswa sendiri, tanpa suruhan atau paksaan dari orang lain. Dalam hal ini terjadi transformasi dalam cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam diri siswa sesuai dengan konsep belajar aktif, sehingga dalam menjalankan kegiatan belajar, hal tersebut menjadi kepribadian, prinsip, dan terapkan secara nyata dalam kegiatan belajarnya sehari-hari. Singkatnya, belajar secara aktif menjadi kebudayaan dan kebiasaan yang permanen dalam kehidupan sehari-hari siswa, sehingga prestasi tinggi dapat diraih dan secara kolektif mampu berkontribusi dalam memajukan pendidikan di Indonesia.

Berkenaan dengan hal di atas, pada saat ini paradigma pendidikan telah bergeser dari berfokus pada guru ke berfokus pada siswa. Pergeseran ini terjadi karena berkembangnya teori psikologi yang dijadikan dasar pendekatan dalam pendidikan. Dalam tulisan ini, ada dua teori psikologi yang dijadikan dasar dalam pendekatan pendidikan modern, yaitu psikologi kognitif dan psikologi konstruktivisme. Psikologi kognitif berasumsi bahwa (a) setiap anak secara kodrati telah dibekali dengan *innate* (bakat bawaan) untuk berkembang, (b) kognisi anak berkembang secara bertahap sesuai dengan perkembangan usia kronologisnya, (c) setiap anak yang belajar selalu mengandung kebermaknaan. Atas dasar asumsi itu, (d) anak dapat berkembang bakatnya sesuai dengan perkembangan kognitifnya.

Sejalan dengan itu, psikologi konstruktivisme juga berasumsi bahwa setiap anak mampu mengkonstruksi kebenaran berdasarkan perkembangan kognisinya asal mendapatkan iklim yang kondusif. Karena itu, yang terpenting dalam belajar bagi anak adalah iklim yang kondusif yang dapat diberikan oleh guru. Atas dasar asumsi psikologi kognitif dan psikologi konstruktivisme di atas, siswa harus

diberi porsi lebih banyak untuk beraktivitas dalam belajar. Premis ini memberikan pesan bahwa setiap guru harus merancang skenario pembelajaran yang memungkinkan anak dapat beraktivitas belajar sebanyak mungkin.

Dalam konteks kegiatan pembelajaran, mengajar merupakan upaya yang dilakukan oleh guru untuk membantu siswa untuk bisa belajar lebih banyak (Darsono, 2002: 24-25). Dalam proses tersebut, siswalah yang menjadi subyek, dialah pelaku kegiatan belajar. Agar siswa berperan sebagai pelaku kegiatan belajar, maka berikut ini dasar-dasar yang diperlukan sebagai pertimbangan untuk memperlakukan siswa sebagai pelaku belajar, yaitu mendorong kesiapan belajar (*readiness*) siswa, memahami berbagai macam gaya belajar siswa, merencanakan aktivitas belajar siswa, dan menyesuaikan materi dengan pengalaman siswa, serta menciptakan iklim yang kondusif untuk pelaksanaan pembelajaran siswa.

a. Mendorong kesiapan belajar (*readiness*) siswa

Menurut Slameto (2010: 113), kesiapan belajar adalah keseluruhan kondisi seseorang yang membuatnya siap untuk memberikan respon atau jawaban di dalam cara tertentu terhadap suatu situasi. Kondisi yang dimaksud adalah kondisi fisik, mental dan emosional, kebutuhan-kebutuhan, motif dan tujuan, keterampilan, pengetahuan dan pengertian yang lain yang telah dipelajari. Untuk memperlakukan siswa sebagai pelaku (subjek) belajar, maka kondisi ini harus benar-benar dalam keadaan maksimal untuk dapat menunjang kesiapan individu dalam proses pembelajaran.

b. Memahami berbagai macam gaya belajar siswa

Selanjutnya, untuk memperlakukan siswa sebagai pelaku (subjek) belajar, setiap guru harus mengenali gaya belajar (*learning style*) siswanya. Setiap siswa memiliki gaya belajar yang berbeda dan bisa belajar dengan lebih baik dengan cara yang berbeda-beda. Memahami gaya belajar setiap siswa merupakan cara terbaik untuk memaksimalkan peran siswa dalam proses belajar di kelas. Gaya belajar adalah variasi cara yang dimiliki seseorang untuk mengakumulasi serta mengasimilasi informasi. Gaya belajar adalah suatu karakteristik kognitif, afektif dan perilaku psikomotorik sebagai indikator yang bertindak relatif stabil untuk pembelajar merasa saling berhubungan dan bereaksi terhadap lingkungan belajar (Gobai, 2005: 1). Gaya belajar adalah cara yang lebih kita sukai dalam melakukan

kegiatan berfikir, memproses dan mengerti suatu informasi (Gunawan, 2006: 139).

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa gaya belajar adalah ciri khas yang dimiliki oleh setiap orang dalam memberikan respon terhadap pembelajaran yang diterimanya. Menurut modalitasnya, gaya belajar dapat dibedakan menjadi tiga yaitu gaya belajar visual, auditorial dan kinestetik (DePorter, 2004: 85). Dalam proses belajar, tidak ada cara yang dianggap benar atau salah karena setiap siswa mempunyai gaya belajar yang berbeda-beda dan memberikan keuntungan dan kekurangan masing-masing. Ketika siswa mampu memahami gaya belajarnya maka, proses belajar siswa akan lebih efisien dan efektif.

c. Merencanakan aktivitas belajar

Dalam hal ini merencanakan pembelajaran yang menuntut siswa banyak melakukan aktivitas belajar sendiri/mandiri. Aktivitas merupakan prinsip atau asas yang sangat penting dalam interaksi pembelajaran sebab pada prinsipnya belajar adalah berbuat untuk mengubah tingkah laku. Tidak ada belajar kalau tidak ada aktivitas. Dalam kegiatan belajar, subyek didik atau siswa harus aktif berbuat. Para siswa mencari pengalaman sendiri dan langsung mengalami sendiri. Dalam hal ini tugas guru menumbuhkan gairah belajar dalam diri siswa dengan cara menjadi fasilitator bagi para siswanya dan memberikan motivasi serta memfasilitasi pengalaman belajar siswa.

Selain itu juga dengan menerapkan strategi pembelajaran yang membuat peserta didik aktif. Perlu dipahami, pemilihan strategi pembelajaran harus benar-benar cocok untuk tingkatan usia SD, dalam hal ini memperhatikan keragaman dan karakteristik siswa SD, baik secara kognitif, fisik, maupun psikis. Selanjutnya, menggunakan media atau alat peraga pembelajaran yang menarik, efektif, menyenangkan. Media tidak mesti mahal, namun dapat diolah dan dimodifikasi dari barang-barang bekas yang terdapat di lingkungan sekitar. Dengan ini, secara langsung mendorong siswa untuk kreatif memanfaatkan barang-barang tidak terpakai menjadi barang edukatif.

d. Materi disesuaikan dengan pengalaman nyata siswa

Dalam pergaulan sehari-hari, siswa sebagai makhluk sosial memperoleh banyak pengalaman. Pengalaman merupakan serangkaian proses dan peristiwa yang dialami oleh seseorang dalam kehidupannya yang terjadi pada suatu waktu. Dengan menyesuaikan materi pelajaran dengan pengalaman dan situasi nyata siswa, maka siswa akan lebih mudah memahami, menghayati, dan menghubungkan materi yang sedang dipelajari dengan masalah yang pernah dia temui dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu pula, keterlibatan siswa dalam belajar semakin tinggi karena siswa merasa tertarik, bahasan yang dipelajari real terjadi dalam kehidupannya, dan tentunya dia dapat memberikan buah pikirannya sesuai dengan pengalaman yang dia miliki. Hal ini sebagaimana teori yang diperkenalkan oleh Kolb, menurutnya pengetahuan diakibatkan oleh kombinasi pemahaman dan mentransformasikan pengalaman” (Alice dan Kolb, 2009: 15). Dengan demikian seorang guru dalam mengajar harus memasukkan pengalaman-pengalaman siswa dalam kegiatan belajar.

e. Menciptakan iklim yang kondusif untuk pelaksanaan pembelajaran siswa

Proses pembelajaran seharusnya mampu menciptakan suasana kelas atau iklim kelas (*Classroom Climate*) yang kondusif untuk mendukung terciptanya kualitas proses pembelajaran. Iklim kelas adalah kondisi lingkungan kelas dalam hubungannya dengan kegiatan pembelajaran. Iklim kelas merupakan suasana yang ditandai oleh adanya pola interaksi atau komunikasi antara guru-siswa, siswa-guru dan siswa-siswa.

Iklim kelas merupakan faktor penting dalam menunjang performansi intelektual siswa. Pemahaman terhadap pengembangan iklim kelas diharapkan akan membentuk karakter siswa sebagai makhluk intelektual. Guru memegang peran sentral dalam mengembangkan iklim kelas dalam kegiatan pembelajaran di kelas dan berlaku untuk semua yang terlibat dalam sistem pendidikan di sekolah. Hasil studi menunjukkan bahwa dalam mengembangkan iklim kelas perlu ditanamkan nilai tanggungjawab, nilai kejujuran, nilai kekritisan, nilai ketekunan, nilai keingintahuan, dan nilai kepedulianguna menumbuhkan semangat belajar

Namun sayangnya, pada realitanya proses pembelajaran yang terjadi selama ini masih cenderung kurang menumbuhkan iklim kelas yang kondusif. Guru cenderung belum menempatkan dirinya sebagai fasilitator, motivator, dan

dinamisator dalam suatu proses pembelajaran dan juga belum menempatkan peserta didik sebagai subjek belajar. Guru lebih cenderung menempatkan dirinya sebagai satu-satunya sumber belajar, sehingga peserta didik selama ini lebih cenderung dianggap sebagai objek belajar yang harus menerima segala sesuatu yang akan diberikan oleh guru. Iklim belajar demikian tentunya kurang kondusif untuk mengembangkan kreatifitas, daya analisis, dan sikap kritis siswa dalam proses pembelajaran. Akibatnya proses pembelajaran yang terjadi selama ini kurang bermakna bagi siswa, sehingga belum mampu mengembangkan kompetensi dan potensi kemampuan siswa secara lebih optimal.

Berikut ini, terkait penciptaan iklim kelas (*Classroom Climate*) dalam lingkup yang lebih kecil, yaitu di kelas, maka beberapa faktor yang perlu diperhatikan guru dalam menciptakan iklim kelas (*Classroom Climate*) yang berkualitas dan kondusif guna memungkinkan siswa belajar antara lain, yaitu:

Pertama, pendekatan pembelajaran berorientasi pada bagaimana siswa belajar (*student centered*), mengandung pengertian bahwa proses pembelajaran hendaknya diarahkan pada siswa yang aktif mengkonstruksi atau membangun sendiri pengetahuannya. Dengan demikian, proses pembelajaran yang dilaksanakan hendaknya berusaha memberi peluang terjadinya proses aktif siswa dalam mengkonstruksi atau membangun sendiri pengetahuannya. Guru hanya bertindak sebagai fasilitator, motivator, dan dinamisator dalam pembelajaran. Pendekatan ini biasa disebut dengan pendekatan konstruktivistik. Dalam pendekatan ini yang perlu dilakukan guru adalah membantu siswa membangun pengetahuan sendiri di dalam benaknya, dengan cara membuat informasi pembelajaran menjadi sangat bermakna dan relevan bagi siswa. Hal ini menurut Mustamaji dapat dilakukan guru dengan cara memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan dan menerapkan sendiri ide-idenya dan mengajak siswa agar menyadari dan secara sadar menggunakan cara-cara mereka sendiri untuk belajar (Mustamaji dan Sugiarto, 2005).

Kedua, adanya penghargaan guru terhadap partisipasi aktif siswa dalam proses kegiatan pembelajaran akan mendorong siswa untuk berani mengemukakan pendapatnya, dan berani mengkritisi materi pembelajaran yang sedang dibahas. Dengan demikian siswa akan terbiasa untuk berpikir kritis,

kreatif, dan terlatih untuk mengemukakan pendapatnya tanpa adanya perasaan minder atau rendah diri. Dalam kaitannya dengan penghargaan terhadap partisipasi aktif siswa ini, hendaknya tidak sekedar dinilai dari segi keaktifannya saja, tetapi juga perlu diperhatikan sikap penghargaan siswa terhadap aktivitas teman-temannya dan kemampuannya didalam bekerja sama dengan orang lain.

Shindler menjelaskan bahwa partisipasi siswa yang tergolong baik dalam proses pembelajaran secara garis besar antara lain diindikasikan sebagai berikut: siswa dapat bekerjasama dengan anggota kelompok yang lain, siswa selalu bersikap positif terhadap teman-temannya dan selalu berusaha sebaik mungkin dalam setiap kesempatan. Berikut indikasi iklim kelas dengan partisipasi siswa yang tergolong baik yang dikemukakan oleh Shindler.

Being cooperative. Good participants cooperate with the other group members. They share ideas and materials. They take turns talking. They listen to one another and expect to be listened to. They perform their role in the group. Having a positive attitude. Good participants approach the task with a positive expectation. They bring others in the group up not down. They say only positive things to their classmates and themselves. They look for ways to solve problems cooperatively and do not blame or quit. Trying your best. Good participants make their best effort when things are going well and when they are not. They work hard regardless of the situation or the behavior of the other members of the group. Their effort is consistent from the beginning of the period until the end. (Shindler, 2001: 193-209.)

Ketiga, guru hendaknya bersikap demokratis dalam memeneg kegiatan pembelajaran. Mengapa demikian? Hal ini karena kepemimpinan guru yang demokratis dalam mengelola proses pembelajaran akan dapat menjadikan siswa merasa nyaman untuk dapat belajar semaksimal mungkin. Hal ini sesuai dengan pandangan Goodlad yang menyatakan bahwa setting demokrasi merupakan pemberian kesempatan seluas-luasnya pada siswa untuk belajar, yaitu bahwa sekolah menjadi tempat yang nyaman bagi siswa untuk semaksimal mungkin mereka belajar (Rosyada, 2004: 19). Kemampuan guru dalam menanamkan setting demokrasi pada siswa sangat berpengaruh terhadap pencapaian misi pendidikan. Dengan demikian suasana pembelajaran yang disetting secara demokratis sangat penting untuk menciptakan proses pembelajaran yang kondusif, berkualitas dan bermakna.

Keempat, setiap permasalahan yang muncul dalam proses pembelajaran hendaknya dibahas secara dialogis. Hal ini karena proses dialogis dalam interaksi pembelajaran lebih mendudukan siswa sebagai subyek didik yang mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dalam setiap interaksi pembelajaran. Proses dialogis juga akan mampu mengembangkan pemikiran kritis siswa dalam membahas dan menyelesaikan setiap permasalahan yang muncul dalam proses pembelajaran. Sebagaimana pandangan Freire (1972: 80) seorang praktisi pendidikan yang banyak menggagas pendidikan liberatif menyatakan bahwa dengan dialog akan memungkinkan munculnya pemikiran kritis, karena hanya dialoglah yang memerlukan pemikiran kritis. Lebih lanjut Friere, menyatakan bahwa tanpa dialog tidak akan ada komunikasi, dan tanpa komunikasi tidak mungkin ada pendidikan sejati.

Kelima, lingkungan kelas sebaiknya disetting sedemikian rupa sehingga memotivasi belajar siswa dan mendorong terjadinya proses pembelajaran. Salah satu cara yang dapat dilakukan dalam menyetting lingkungan kelas yang kondusif untuk belajar siswa yaitu dengan cara mengatur tempat duduk atau meja-kursi siswa secara variatif dan pengaturan perobot sekolah yang cukup artistik, serta pemanfaatan dinding-dinding rungan kelas sebagai media penyampai pesan pembelajaran. Pengaturan setting tempat duduk hendaknya dilakukan sesuai kebutuhan dan strategi pembelajaran yang digunakan. Haryanto menyatakan bahwa pengaturan ruang secara tepat dapat menciptakan suasana yang wajar, tanpa tekanan, dan menggairahkan siswa untuk belajar secara efektif (Haryanto, 2001: 73-81). Pengaturan itu hendaknya memungkinkan siswa duduk berkelompok dan memudahkan guru secara leluasa membimbing dan membantu siswa dalam belajar. Pengaturan meja secara berkelompok, akan mampu meningkatkan kerjasama yang baik antar siswa.

Keenam, menyediakan berbagai jenis sumber belajar atau informasi yang berkaitan dengan berbagai sumber belajar yang dapat diakses atau dipelajari. Hal ini mengandung pengertian bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar dalam proses pembelajaran. Siswa dapat belajar dalam ruang perpustakaan, dalam "ruang sumber belajar" yang khusus atau bahkan di luar sekolah, bila ia mempelajari lingkungan yang berhubungan dengan tugas atau masalah tertentu.

Peranan guru adalah memberi bimbingan konsultasi, pengarahan jika ada kesulitan siswa dalam memahami materi pembelajaran. Selain itu guru juga dituntut untuk memberikan informasi tentang dimana sumber belajar yang harus dipelajari tersebut berada, sehingga siswa secara aktif dan mandiri dapat menemukan dan mengakses sumber belajar tersebut. Jenis sumber belajar tersebut bisa dalam bentuk: buku, modul, pembelajaran berprograma, audio, video, dan lain sebagainya. Hal ini akan mempermudah siswa untuk dapat belajar sesuai dengan kemampuan dan karakteristik gaya belajarnya masing-masing.

Dengan demikian, pembelajaran yang menjadikan siswa sebagai pelaku belajar adalah pembelajaran yang benar-benar membelajarkan siswa. Ini berarti, belajar yang dilakukan oleh siswa bukan hanya menghafal, bukan pula hanya mengingat. Namun pembelajaran bermakna yang mengarahkan adanya perubahan perilaku pada diri seseorang. Berikut ini, tambahan beberapa asas yang harus guru perhatikan dalam pelaksanaan pembelajaran, yaitu:

- a. Kemitraan, siswa tidak dianggap sebagai bawahan melainkan diperlakukan sebagai mitra kerjanya
- b. Kebersamaan, pembelajaran dilaksanakan melalui kelompok dan kolaboratif.
- c. Partisipasi, setiap siswa dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan sehingga mereka merasa bertanggung jawab atas pelaksanaan keputusan tersebut, sekaligus juga bertanggung atas setiap kegiatan belajar yang dilaksanakannya.
- d. Keswadayaan, mendorong tumbuhnya swadaya (*self supporting*) secara optimal atas setiap aktivitas belajar yang dilaksanakannya.
- e. Manfaat, materi pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan dan dapat memberikan manfaat untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi siswa pada masa sekarang maupun yang akan datang.
- f. Lokalitas, materi pembelajaran dikemas dalam bentuk yang paling sesuai dengan potensi dan permasalahan di wilayah (lingkungan) tertentu (*locally specific*), yang mungkin akan berbeda satu tempat dengan tempat lainnya.

C. KESIMPULAN

Secara umum, berdasarkan survey lembaga pemeringkatan pendidikan dunia dinyatakan mutu pendidikan di Indonesia pada saat ini masih tertinggal

dibandingkan negara-negara maju. Ujian Nasional (UN) bertujuan untuk memajukan mutu pendidikan Indonesia dengan menetapkan 8 standar mutu pendidikan nasional. Berbeda dengan pelaksanaan UN tahun sebelumnya, UN pada tahun 2015 ini bukan lagi penentu utama kelulusan siswa. Kelulusan diserahkan sepenuhnya kepada pihak sekolah dengan mempertimbangkan hasil semua mata pelajaran dan aspek perilaku siswa. Menanggapi kebijakan ini, respon masyarakat sangat beragam. Namun secara umum mereka menyambut gembira karena secara psikologis siswa menjadi tidak tertekan dalam belajar dan begitupun juga dengan sekolah, menjadi tidak terbebani karena beratnya tanggungjawab yang diemban.

Terlepas dari persoalan UN sebagai ketetapan kelulusan siswa atau bukan, sudah suatu kewajiban bagi siswa untuk semangat dalam belajar. Sekolah tidak semestinya diorientasikan hanya untuk mendapatkan ijazah dan sekedar lulus, namun terpenting bisa mendapatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang sebanyak-banyaknya, yang sangat berguna bagi masa depan siswa sendiri yang lebih sukses dan cemerlang, yang mana peran dan kiprahnya sangat diperlukan untuk pembangunan bangsa dan negara Indonesia nantinya. Oleh karena itu, dengan dikeluarkannya Permendikbud No. 5 Tahun 2015 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik Ujian Nasional harus menjadi momentum bagi siswa untuk semakin aktif dalam belajar, yang ditunjukkan dengan semangat, kegigihan, dan ketekunan untuk meraih prestasi belajar yang lebih tinggi. Proses mencapai itu dilakukan melalui pembudayaan siswa aktif belajar.

Pembudayaan siswa aktif belajar adalah bagaimana belajar menjadi senyawa dan menjelma jadi suatu kebudayaan, tradisi, dan kebiasaan pada diri siswa, sehingga karenanya keaktifan belajar itu datang dari siswa sendiri, tanpa suruhan atau paksaan dari orang lain. Dalam hal ini terjadi transformasi dalam cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam diri siswa sesuai dengan konsep belajar aktif, sehingga dalam menjalankan kegiatan belajar, hal tersebut menjadi kepribadian, prinsip, dan teraplikasi secara nyata dalam kegiatan belajarnya sehari-hari. Singkatnya, belajar secara aktif menjadi kebudayaan dan kebiasaan yang permanen dalam kehidupan sehari-hari siswa.

Sesuai teori psikologi modern, yaitu psikologi kognitif dan psikologi konstruktivisme, maka dalam belajar, siswalah yang menjadi subyek, dialah pelaku kegiatan belajar. Untuk mencapai itu yang harus dilakukan adalah mendorong kesiapan belajar (*readiness*) siswa, memahami berbagai macam gaya belajar siswa, merencanakan aktivitas belajar siswa, dan menyesuaikan materi dengan pengalaman siswa, serta menciptakan iklim yang kondusif untuk pelaksanaan pembelajaran siswa. Selain itu, beberapa asas yang harus guru perhatikan dalam pelaksanaan pembelajaran yang mengaktifkan siswa, yaitu asas kemitraan, asas kebersamaan, asas partisipasi, asas keswadayaan, asas manfaat, dan asas lokalitas.

D. DAFTAR PUSTAKA

- Alice Y. K dan David Kolb. 2009. *Experiential Learning Theory: A Dynamic, Holistic Approach to Management Learning, Education and Development*. Sage. London.
- Darsono. 2002. *Teori Pembelajaran*. Erlangga. Jakarta.
- DePorter, Bobbi. 2004. *Quantum Learning: Membiasakan Belajar Nyaman dan Menyenangkan*. Kaifa. Bandung.
- Freire, Poul. 2000. *Pendidikan kaum tertindas*. Terj. Otomo Danarjaya, dkk. LP3ES. Jakarta. (Buku asli diterbitkan tahun 1972)
- Gobai, Yosep. 2005. *Pengaruh Penggunaan Bahan Ajar dan Gaya Belajar terhadap Hasil Belajar*”.
- Gultom, Syawal. *Ujian Nasional sebagai Wahana Evaluasi Pengembangan Pendidikan Karakter Bangsa*.
- Gunawan, Adi W, , 2006. *Genius Learning Strategi*. Pustaka Utama. Jakarta.
- Haryanto. 2001. *Penciptaan Iklim Belajar Yang Kondusif di SD melalui Penataan Lingkungan Kelas*. *Dinamika Pendidikan: Majalah Ilmu Pendidikan FIP Universitas Negeri Yogyakarta*. No. 2/Th. VIII, November. Yogyakarta.
- Koentjaraningrat. 1996. *Kebudayaan Mentalis dan Pembangunan*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Mustamaji dan Sugiarto. 2005. *Pembelajaran Berbasis Konstruktivistik: Penerapan dalam Pembelajaran Berbasis Masalah*. Universitas Negeri Surabaya. Surabaya.
- Nashir, Fuad. 2007. *Ujian Nasional 2007: Antara Kuasa Negara dan Peningkatan Mutu Pendidikan*. Skripsi IAIN Sunan Ampel Surabaya. Surabaya.

Notodiputro dan Khairil Anwar. 2012. *Ujian Nasional: Sarana untuk Membangun Karakter Bangsa*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta.

Rosyada, Dede. 2004. *Paradigma Pendidikan Demokratis: Sebuah Model Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan*. Prenada Media. Jakarta.

Setiadi, Hari . *Dampak Ujian Nasional pada Karakter Bangsa*.

Slameto. 2010. *Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya*. Rineka Cipta. Jakarta.

Tilaar, H. A. R. 2006. *Standarisasi Pendidikan Nasional: Suatu Tinjauan Kritis*. Rineka Cipta. Jakarta.

Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka. Jakarta.